**BAB II**

**TINJAUAN TEORI**

1. **Landasan Teori.**
2. **Teori Agensi.**

Teori keagenan dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang diartikan sebagai sebuah teori yang membahas hubungan pemilik (*principal*) dengan manajer (*agent*). Teori agensi atau keagenan yaitu teori yang menjelaskan hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham (*principal*) dengan manajemen atau pelaksana operasional perusahaan (*agent*) yang biasanya menunjukkan hubungan yang asimetri. Asimetri maksudnya adalah terdapat perbedaan keperntingan antara kedua belah pihak dimana mereka saling berusaha untuk mencapai kemakmuran yang dikehendaki masing – masing.

Dalam penelitian ini, variabel *cash conversion cycle*, *corporate governance* (dewan komisaris, komite audit) dan pengungkapan *sustainability report* merupakan bagian dari pihak manajemen perusahaan (*agent*). Sedangkan kepemilikan insitusional merupakan bagian dari pihak pemegang saham (*principal*), dimana para pemegang saham akan menilai kinerja keuangan perusahaan melalui analisis ROA dari laporan leuangan tahunan yang diberikan dari perusahaan kepada *stakeholders* termasuk pemegang saham.

Maka dari itu, untuk memperlihatkan bahwa kinerja keuangan perusahaan selalu nampak sehat pihak agen (dewan komisaris, komite audit) harus mampu membuat sistem manajemen keuangan yang baik. Pihak manajemen diharuskan mampu menghasilkan siklus konversi kas yang memiliki perputaran kas dalam waktu singkat dalam hal persediaan dan piutangnya sehingga dapat menaikkan pendapatan. Pendapatan dan laba inilah yang diharapkan oleh para pemegang saham (pemilik saham institusional). Selain itu, perusahaan juga harus memikirkan keberlangsungan usahanya lewat pengungkapan *sustainability report.*

1. **Teori *Stakeholder*.**

Perkembangan teori *stakeholder* diawali dengan berubahnya bentuk pendekatan perusahaan dalam melakukan aktifitas usaha. Ada dua bentuk dalam pendekatan *stakehoder* menurut Budimanta, dkk (2008) yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation. Old corporate relation* menekankan pada bentuk pelaksanaan aktifitas perusahaan secara terpisah dimana setiap fungsi dalam sebuah perusahaan melakukan pekerjaannya tanpa adanya kesatuan diantara fungsi - fungsi tersebut.

Hubungan antara pemimpin dengan karyawan dan pemasok pun berjalan satu arah, kaku dan berorientasi jangka pendek. Hal itu menyebabkan setiap bagian perusahaan mempunyai kepentingan, nilai dan tujuan yang berbeda - beda bergantung pada pimpinan masing - masing fungsi tersebut yang terkadang berbeda dengan visi, misi, dan capaian yang ditargetkan oleh perusahaan. Pendekatan tipe ini akan banyak menimbulkan konflik karena perusahaan memisahkan diri dengan para *stakeholder* baik yang berasal dari dalam perusahaan dan dari luar perusahaan. *New-corporate relation* menekankan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh *stakeholder* perusahaan sehingga bukan hanya menempatkan dirinya sebagai bagian yang bekerja secara sendiri dalam sistem sosial masyarakat karena profesionalitas telah menjadi hal utama dalam pola hubungan ini.

Hubungan perusahaan dengan *stakeholders* internal dibangun berdasarkan konsep kebermanfaatan yang membangun kerjasama untuk bisa menciptakan kesinambungan usaha perusahaan sedangkan hubungan dengan *stakeholder* di luar perusahaan bukan hanya bersifat transaksional dan jangka pendek namun lebih kepada hubungan yang bersifat fungsional yang bertumpu pada kemitraan selain usaha untuk menghimpun kekayaan yang dilakukan oleh perusahaan, perusahaan juga berusaha untuk bersama-sama membangun kualitas kehidupan *stakeholders* eksternal.

Pendekatan *new-corporate relation* mengeliminasi penjenjangan status diantara para *stakeholder* perusahaan seperti yang ada pada *old-corporate relation*. Perusahaan tidak lagi menempatkan dirinya di posisi paling atas sehingga perusahaan memprioritaskan dirinya dari para *stakeholder* sehingga dengan pola hubungan semacam ini arah dan tujuan perusahaan bukan lagi pada bagaimana menghimpun kekayaan sebesar - besarnya namun lebih kepada pencapaian pembangunan yang berkelanjutan (*sustainability development*).

Menurut Ghazali dan Chariri (2007 : 409), Teori *stakeholder* merupakan teori yang menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan sendiri, namun harus memberikan manfaat kepada seluruh *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, *supplier*, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak lain). Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi bahan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengungkap atau tidak suatu informasi di dalam laporan perusahaan tersebut. Tujuan utama dari teori *stakeholder* adalah untuk membantu manajemen perusahaan dalam meningkatkan penciptaan nilai sebagai dampak dari aktivitas - aktivitas yang dilakukan dan meminimalkan kerugian yang mungkin muncul bagi *stakeholder*.

1. **Teori Legitimasi.**

Menurut Ahmad dan Sulaiman (2004), teori legitimasi didasarkan pada pengertian kontrak sosial yang diimplikasikan antara institusi sosial dan masyarakat. Teori tersebut dibutuhkan oleh institusi - institusi untuk mencapai tujuan agar kongruen dengan masyarakat luas. Gray, *et al* (1996 : 46) berpendapat bahwa legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok masyarakat. Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat, operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Deegan, Robin dan Tobin (2000) menyatakan legitimasi dapat diperoleh manakala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

Teori legitimasi menganjurkan perusahaan untuk meyakinkan bahwa aktivitas dan kinerjanya dapat diterima oleh masyarakat. Perusahaan menggunakan laporan tahunan mereka untuk menggambarkan kesan tanggung jawab lingkungan, sehingga mereka diterima oleh masyarakat. Dengan adanya penerimaan dari masyarakat tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat meningkatkan laba perusahaan. Hal tersebut dapat mendorong atau membantu investor dalam melakukan pengambilan keputusan investasi. Carroll dan Bucholtz (2003) menyatakan perkembangan tingkat kesadaraan dan peradaban masyarakat membuka peluang meningkatnya tuntutan terhadap kesadaran kesehatan lingkungan.

Lebih lanjut dinyatakan, bahwa legitimasi perusahaan dimata *stakeholder* dapat dilakukan dengan integritas pelaksanaan etika dalam berbisinis (*business ethic integrity*) serta meningkatkan tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*). Wibisono (2007) menyatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan (*social responsibility*) memiliki kemanfaatan untuk meningkatkan reputasi perusahaan, menjaga image dan strategi perusahaan. Legitimasi masyarakat merupakan faktor strategis bagi perusahaan dalam rangka mengembangkan perusahaan kedepan.

1. **Kinerja Keuangan Perusahaan.**
   1. **Pengertian Kinerja Keuangan.**

Kinerja keuangan adalah gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dana maupun penyaluran dana yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas. Menurut Sawir (2005 : 6), kinerja keuangan adalah penilaian kondisi keuangan yang menjadi prestasi perusahaan yang memerlukan analisis dengan beberapa tolak ukur seperti rasio dan indeks sehingga dua data keuangan bisa terhubung antara satu dengan yang lain. Kinerja keuangan erat kaitannya dengan pengukuran dan penilaian kinerja sebuah perusahaan untuk menentukan jenis akuntansi keuangan yang sesuai terkait operasional yang efektif, yang dinilai yaitu penampakan organisasi dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, kriteria dan unsur – unsur laporan keuangan yang telah ditetapkan.

1. **Rasio Kinerja Keuangan.**

Kinerja keuangan dapat dihitung dalam beberapa rasio, antara lain :

1. Rasio likuiditas, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek. Jenis rasio likuiditas antara lain : rasio lancar atau *current ratio*, rasio cepat atau *quick ratio*, dan rasio kas atau *cash ratio*. Jika sebuah perusahaan mampu membayar kewajibannya secara tepat dan tidak ada resiko gagal bayar maka kinerja perusahaan tersebut dapat dikatakan baik. Investor hanya akan berinvestasi pada perusahaan yang sehat dan *going concern*.
2. Rasio solvabilitas (*leverage ratio*),adalah rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang (Kasmir (2010 : 151)). Jenis rasio solvabilitas, antara lain : *debt ratio*(rasio utang), *debt-to-equity ratio*, *times interest-earned ratio* (disebut juga *interest coverage ratio, times interest-earned ratio*, merupakan rasio yang mengevaluasi kemampuan perusahaan untuk melunasi beban bunga di masa depan). Artinya seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya.
3. Rasio aktivitas, adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya. Kinerja keuangannya dikatakan baik jika dalam penggunakan aktiva seimbang dengan aktivitas operasional perusahaan tersebut. Jika penggunaan aktiva lebih banyak dibandingkan aktivitas operasionalnya, maka kinerja keuangannya kurang baik.
4. Rasio profitabilitas, adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini menunjukkan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Jenis – jenis rasio profitabilitas, antara lain : margin laba kotor (*gross profit margin*), margin laba operasional (*operating profit margin*), margin laba bersih (*net profit margin*), rasio pengembalian aset (*return on assets ratio*), rasio pengembalian ekuitas (*return on equity ratio*), rasio pengembalian penjualan (*return on sales ratio*), pengembalian modal yang digunakan (*return on capital employed*), *return on investment* (ROI), *earning per share* (EPS). Perusahaan yang mempunyai laba atau keuntungan yang tinggi dipastikan kinerja keuangannya baik. Sehingga, nilai perusahaan juga meningkat.

Dengan demikian berarti jika kinerja keuangan yang dimiliki perusahaan semakin baik, maka akan menarik minat investor. Kemudian semakin banyak investor menanamkan sahamnya pada perusahaan, maka harga saham akan meningkat. Jika harga saham meningkat tentu nilai perusahaan akan meningkat. Nilai perusahaan inilah yang diukur sebagai kinerja keuangan perusahaan. Rasio profitabilitas merupakan sarana yang sangat penting untuk menilai performa suatu perusahaan tertentu.

1. ***Cash Conversion Cycle* (CCC).**

Menurut Keown (2010 : 245), modal kerja yang minimum dapat dicapai dengan menagih secara cepat kas dari penjualan, meningkatkan perputaran persediaan, dan menurunkan pengeluaran tunai. Semua faktor ini dapat digabungkan ke dalam ukuran tunggal yang disebut siklus perubahan kas (*cash conversion cycle*). Keown (2010) mengemukakan bahwa *cash conversion cycle* (CCC) merupakan penjumlahan sederhana dari jumlah hari piutang (DSO) dan jumlah hari penjualan persediaan (DSI) dikurangi jumlah hari pembayaran yang belum diselesaikan (DPO). Gitman dan Zutter (2012 : 601) mendefinisikan *cash conversion cycle* sebagai lamanya waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk mengubah kas yang diinvestasikan dalam operasinya menjadi kas yang diterima sebagai hasil dari operasinya.. Perhitungan *cash conversion cycle* (CCC) dilakukan untuk mengetahui lama waktu yang diperlukan untuk menjual persediaan perusahaan, lama waktu yang diperlukan untuk menagih piutangnya dan lama waktu yang dimiliki perusahaan untuk membayar hutangnya.

Untuk menghasilkan profitabilitas yang tinggi maka diperlukan manajemen modal kerja yang baik dan benar agar perusahaan dapat berjalan dengan baik dan memaksimalkan profitabilitas (Rahimi *et al*, 2015). Jadi, jika tingkat investasi dalam persediaan dan piutang tinggi, maka perputaran kas menjadi pendapatan menjadi lambat sehingga profitabilitas rendah. Apabila profitabilitas rendah, maka perusahaan akan lambat juga dalam siklus pembayaran hutang sehingga likuiditas perusahaan rendah. Sebaliknya, jika investasi dalam persediaan dan piutang rendah, maka perputaran kas menjadi cepat sehingga profitabilitas tinggi. Sehingga pada akhirnya kinerja keuangan perusahaan dinilai baik.

1. **Dewan Komisaris.**
   1. **Pengertian Dewan Komisaris.**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33 /POJK.04/2014, tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dewan komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Keanggotaan dewan komisaris di atur sebagai berikut :

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota, di mana 1 (satu) di antaranya adalah komisaris independen.
2. Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan sesuai persetujuan dari anggota Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk masa jabatan 5 tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan yang ditetapkan. Bagi anggota dewan komisaris yang telah habis masa jabatanya maka dapat diangkat kembali atau diberhentikan melalui RUPS.
   1. **Fungsi Dewan Komisaris.**

Fungsi dewan komisaris berdasarkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-01/MBU/2011, tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, antara lain :

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu.
4. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memantau dan memastikan bahwa GCG telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
5. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas harus memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMN telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan - pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas di perusahaan lain, termasuk rapat - rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi), serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan.
6. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

Jadi, tugas dewan komisaris sebagai tanggung jawab dewan pengawas adalah melakukan pengawasan dan memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan *good corporate governance*. Hal ini sebagai langkah untuk menjamin kinerja keuangan perusahaan yang baik. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris, maka akan memudahkan untuk mengendalikan CEO dan memonitoring jalannya perusahaan agar semakin efektif.

1. **Komite Audit.**
2. **Pengertian Komite Audit.**

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 /POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, pengertian komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada dewan komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Anggota komite audit diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris. Komite audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar emiten atau perusahaan publik. Komite audit diketuai oleh komisaris independen.

1. **Tugas Komite Audit.**

Komite audit memiliki tugas dan tanggung jawab, antara lain :

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan emiten atau perusahaan publik.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai penunjukan akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh direksi, jika emiten atau perusahaan publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah dewan komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan emiten atau perusahaan publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada dewan komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan emiten atau perusahaan publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi emiten atau perusahaan publik.

Tujuan komite audit yaitu untuk membantu melakukan pengecekkan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Keberadan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

1. **Kepemilikan Institusional.**

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yakni : perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, maupun perusahaan swasta. Menurut Pasaribu & Sulasmiyati (2016), kepemilikan institusional merupakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional adalah alat yang dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan dalam suatu perusahaan. Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah kepemilikan saham oleh institusi (pemerintah, perusahaan asing, lembaga keuangan seperti asuransi, bank, dan dana pension) yang terdapat pada perusahaan. Sedangkan menurut Mei Yuniati, Kharis Raharjo (2016), kepemilikan institusional adalah tingkat kepemilikan saham oleh institusi dalam perusahaan, diukur oleh proposi saham yang dimiliki oleh institusional pada akhir tahun yang dinyatakan dalam persentase. Kepemilikan institusional mempunyai fungsi penting dalam mengawasi manajemen karena dengan adanya kepemilikan institusional, maka akan adanya dorongan tingkat pengawasan yang lebih baik. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional akan menjamin kemakmuran pemegang saham.

Pengaruh kepemilikan institusional dalam menjadi pihak pengawas ditekankan dalam investasi yang cukup besar dalam pasar modal. Tingkat kepemilikan institusional yang besar akan menghasilkan usaha pengawasan yang lebih besar oleh pihak investor institusional, sehingga perilaku oportunistik manajer dapat berkurang. Kepemilikan saham institusional dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dinilai dari saham yang dimiliki para pemegang saham dibandingkan dengan saham yang beredar. Jika modal saham besar, berarti investasi yang diberikan kepada perusahaan besar, sehingga perusahaan mendapat aliran dana yang sehat. Pemegang saham membeli saham perusahaan dengan harapan memperoleh tingkat pengembalian atas investasi mereka yang setinggi – tingginya. Manajemen perusahaan yang dipilih dan dibayar oleh pemegang saham harus berusaha mengeluarkan kebijakan – kebijakan untuk meningkatkan kesejeahteraan prinsipal.

1. ***Sustainability Report*.**
2. **Pengertian *Sustainability Report.***

*Sustainability report* adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (*disclose*), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dengan tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Laporan keberlanjutan atau *sustainability report* merupakan sebuah bentuk laporan yang berisi informasi mengenai dampak ekonomi, lingkungan dan sosial sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012, tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, pasal 2 dan pasal 6 yaitu :

Setiap perseroan selaku subjek hukum mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dimuat dalam laporan tahunan perseroan dan dipertanggungjawabkan kepada RUPS.

1. ***Global Reporting Initiative* (*GRI*).**

Penyusunan *sustainability report* berpedoman pada *Global Reporting Initiative* (GRI) yang didalamnya mengatur tentang indikator pengungkapan aspek lingkungan, aspek sosial dan aspek ekonomi, dimana yang sesuai standar GRI, terdapat dua pilihan metode yaitu : *Comprehensive*dan*Core*,tergantung pada sejauh mana pengungkapan yang tercakup dalam laporan. Jika menggunakan metode *comprehensive* maka semua yang dipersyaratkan dalam pengungkapan umum (*General Disclousure*) dan semua topik spesifik yang material bagi organisasi harus dilaporkan. Jika menggunakan metode *core*/inti, maka yang dilaporkan hanya yang berlabel *core* dalam pengungkapan umum (*General Disclousure*) dan memilih topik spesifik dalam topik yang material bagi organisasi.

1. Perkembangan pedoman GRI, yaitu :
2. *Global Reporting Initiative* (GRI) – G.1 mulai tahun 2000.
3. *Global Reporting Initiative* (GRI) – G.2 mulai tahun 2002.
4. *Global Reporting Initiative* (GRI) – G.3 mulai tahun 2006.
5. *Global Reporting Initiative* (GRI) – G.3.1 mulai tahun 2011.
6. *Global Reporting Initiative* (GRI) – G.4 mulai tahun 2013.
7. *Global Reporting Initiative* (GRI) – G.Standards tahun 2016 dan mulai efektif berlaku pada tanggal 1 Juli 2018.
8. Modular *sustainability reporting* versi GRI Standards, antara lain:
9. *FOUNDATION –* GRI-101
10. *GENERAL DISCLOSURE –* GRI-102
11. *MANAGEMENT APPROACH –* GRI-103
12. *ECONOMIC DISCLOSURE –* GRI-200
13. *Economic Performance Topic*
14. *Market Presence Topic*
15. *Indirect Ecomonic Impacts Topic*
16. *Procurement Practices Topic*
17. *Anti Corruption Topic*
18. *Anti Competitive Behavior Topic*
19. *Tax Topic*
20. *ENVIRONTMENT DISCLOSURE –* GRI-300
21. *Materials Topic*
22. *Energy Topic*
23. *Water and Effluents Topic*
24. *Biodiversity Topic*
25. *Emmisions Topic*
26. *Effluents and Waste Topic*
27. *Environmental Compliance Topic*
28. *Supplier Environmental Assessment Topic*
29. *SOCIAL DISCLOSURE –* GRI-400
30. *Employement Topic*
31. *Labor Management Relations Topic*
32. *Occupational Health and Safety Topic*
33. *Training and Educations Topic*
34. *Diversity and Equal Opportunity Topic*
35. *Non Discrimination Topic*
36. *Freedom of Accociation and Collective Bargaining Topic*
37. *Child Labor Topic*
38. *Forced or Compulsary Labor Topic*
39. *Security Practices Topic*
40. *Rights of Indigenous Peoples Topic*
41. *Human Rights Assessment Topic*
42. *Local Communities Topic*
43. *Supplier Social Assessment Topic*
44. *Public Policy Topic*
45. *Customer Health and Safety Topic*
46. *Marketing and Labeling Topic*
47. *Customer Privacy Topic*
48. *Socioeconomic Compliance Topic*
49. **Prinsip – prinsip *Sustainability Report*.**

Berikut ini prinsip - prinsip *sustainability report*, yaitu :

1. Keseimbangan, yaitu laporan harus menggambarkan aspek positif dan negatif dari kinerja perusahaan untuk dapat memungkinkan penilaian yang masuk akal terhadap keseluruhan kinerja. Keseluruhan penyajian isi laporan harus menyajikan gambaran yang tidak bias terhadap kinerja organisasi. Laporan harus menghindari pemilihan, penghilangan, atau penyajian format yang memungkinkan kesalahan penilaian oleh pembaca laporan.
2. Dapat diperbandingkan, yaitu :
   1. Isu-isu dan informasi harus dipilih, dikumpulkan, dan dilaporkan secara konsisten.
   2. Informasi yang dilaporkan harus disajikan dalam sebuah cara yang memungkinkan pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu dan dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lainnya.
   3. Konsistensi dalam melaporkan memungkinkan pihak-pihak internal dan eksternal untuk melakukan perbandingan.

3) Kecermatan, yaitu informasi yang dilaporkan harus cukup cermat dan detail bagi pemangku kepentingan dalam menilai kinerja organisasi.

1. Ketepatan waktu, yaitu laporan dilakukan berdasarkan jadwal reguler serta informasi kepada pemangku kepentingan tersedia tepat waktu ketika dibutuhkan dalam mengambil kebijakan.

5) Kejelasan, yaitu :

* 1. Laporan harus menyajikan informasi dalam cara yang dapat dimengerti, dapat diakses, dan dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan organisasi (baik dalam bentuk cetak maupun saluran lainnya). Pemangku kepentingan harus dapat menemukan informasi yang dibutuhkannya tanpa harus bekerja keras.
  2. Grafik dan tabel data terkonsolidasi dapat membantu dalam memahami dan mengakses informasi yang ada dalam laporan.

6) Keterandalan, yaitu :

* 1. Informasi dan proses yang digunakan dalam penyiapan laporan harus dikumpulkan, direkam, dikompilasi, dianalisis, dan diungkapkan dalam sebuah cara yang dapat diuji dan dapat membentuk kualitas dan materialitas dari laporan.
  2. Informasi dan data yang termasuk dalam laporan harus didukung oleh pengendalian internal atau dokumentasi yang dapat di-*review* oleh individu di luar mereka yang terlibat dalam pembuatan laporan.

1. **Manfaat *Sustainability Report*.**
2. Manfaat *sustainability report* atau laporan keberlanjutan bagi pihak internal, antara lain :
3. Peningkatan pemahaman tentang risiko dan peluang yang mempengaruhi strategi dan kebijakan manajemen jangka panjang, dan rencana bisnis
4. Menekankan keterkaitan antara kinerja keuangan dan non keuangan.
5. Tolak ukur dan penilaian kinerja keberlanjutan sehubungan dengan hukum, norma, kode, standar kinerja, dan inisiatif sukarela.
6. Menghindari terlibat dalam kegagalan lingkungan, sosial dan tata kelola yang dipublikasikan.
7. Manfaat *sustainability report* atau laporan keberlanjutan bagi pihak eksternal, antara lain :
8. Mengurangi dampak lingkungan, sosial dan tata kelola yang negatif.
9. Meningkatkan reputasi dan loyalitas merek.
10. Memungkinkan pemangku kepentingan eksternal untuk memahami nilai sebenarnya organisasi, serta aset berwujud dan tidak berwujud.
11. Menunjukkan bagaimana organisasi mempengaruhi, dan dipengaruhi oleh, ekspektasi tentang pembangunan berkelanjutan.

Secara internal, *sustainability report* penting karena memungkinkan perusahaan memperkirakan dampak operasi mereka terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi. Dan secara eksternal, *sustainability report* dapat membantu perusahaan terlibat lebih baik dengan pihak yang berkepentingan. Dengan memberitahu pemangku kepentingan mereka tentang keputusan proyek jangka pendek, menengah, dan panjang organisasi, perusahaan dapat lebih memahami mana yang mungkin memiliki keluaran keuangan yang positif.

1. **Penelitian Sebelumnya**
2. **Pengaruh *Cash Conversion Cycle* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Peneliti Telly dan Ansori (2017), meneliti pada 261 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2013 – 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *cash conversion cycle* berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA). Selanjutnya peneliti Hoang, *et al* (2018), meneliti pada 69 perusahaan publik di Vietnam selama periode 2014 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen modal kerja *cash conversion cycle* (CCC), tingkat pertumbuhan dan arus kas memiliki hubungan positif yang signifikan dengan kinerja keuangan perusahaan. Peneliti Permana dan Ugut (2021), meneliti pada 14 perusahaan jasa konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama bulan Juni 2015 - Juni 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus konversi kas berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diukur menggunakan *Return on Assets* (ROA). Sedangkan peneliti Rahmantika dan Juliarto (2020), meneliti pada 82 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama tahun 2014 – 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siklus konversi kas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap profitabilitas perusahaan.

1. **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Peneliti Rahmawati, dkk (2017), meneliti pada 12 perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun tahun 2013 - 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya peneliti Danoshana dan Ravivathani (2019), meneliti pada 25 perusahaan dari 33 perusahaan Sri Lanka yang terdaftar dan dibagi menjadi empat klaster seperti : industri perbankan, pembiayaan, persewaan dan asuransi di Bursa Efek Kolombo periode 2008 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan variabel *corporate governance* melalui ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Peneliti Irma (2019), meneliti pada 43 perusahaan sektor properti, perumahan dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2013 - 2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan peneliti Hidalgo, *et al* (2011), meneliti pada 100 perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Meksiko untuk periode 3 tahun, 2005 – 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan modal intelektual, namun jika jumlah terus meningkat efeknya membalikkan dan menjadi merugikan untuk meningkatkan kapasitas pengawasan dan pengendalian dalam proses pengambilan keputusan mengenai pengungkapan modal intelektual. Peneliti Dewi, dkk (2018), meneliti pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan periode pengamatan dari tahun 2014 sampai dengan 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Banyak sedikitnya jumlah dewan komisaris, tidak mempengaruhi kinerja perusahaan.

1. **Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Peneliti Danoshana dan Ravivathani (2019), meneliti pada 25 perusahaan dari 33 perusahaan Sri Lanka yang terdaftar dan dibagi menjadi empat klaster seperti : industri perbankan, pembiayaan, persewaan dan asuransi di Bursa Efek Kolombo periode 2008 – 2012. Hasil penelitian menunjukkan variabel *corporate governance* melalui ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Peneliti Irma (2019), meneliti pada 43 perusahaan sektor properti, perumahan dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2013 - 2017. Hasil penelitian menunjukkan komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan peneliti Hidalgo *et al* (2011), meneliti pada 100 perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Meksiko untuk periode 3 tahun, 2005 – 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak memiliki kaitan dengan pengungkapan modal intelektual. Dan peneliti Rahmawati, dkk (2017) yang meneliti pada 12 perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun tahun 2013 – 2015, menunjukkan hasil penelitian bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1. **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Peneliti Setiawan (2016), meneliti pada 27 perusahaan perbankan yang terdaftar pada BEI tahun 2012 – 2015. Hasil penelitian menunjukkan *corporate governance* berpengaruh secara simultan terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan secara parsial *corporate governance* dalam hal kepemilikan institusional berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya peneliti Irma (2019), meneliti pada 43 perusahaan sektor properti, perumahan dan konstruksi yang terdaftar di BEI periode 2013 - 2017. Hasil penelitian menunjukkan kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Peneliti Saifi (2019), meneliti pada 22 perusahaan properti dan *real estate* yang terdaftar di BEI selama tahun 2011 – 2015. Hasil penelitian menunjukkan variabel independen yang digunakan yaitu kepemilikan institusional (KI) memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap variabel kinerja keuangan yang diwakili oleh variabel *Return on Assets* (ROA). Sedangkan peneliti Hidalgo, *et al* (2011), meneliti pada 100 perusahaan yang diperdagangkan di Bursa Efek Meksiko untuk periode 3 tahun, 2005 – 2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional menghambat pengungkapan modal intelektual. Dan peneliti Fadillah (2017) yang meneliti pada 45 perusahaan yang memiliki likuiditas tertinggi yang terdaftar di LQ45 periode 2012 - 2015, menunjukkan penelitian bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan.

1. **Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Peneliti Platonova, *et al* (2016), meneliti pada 24 bank syariah *full edged* dari lima negara GCC, yaitu Bahrain, Arab Saudi, Qatar, Kuwait dan Uni Emirat Arab (UEA) selama tahun 2000 – 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang signifikan antara pengungkapan CSR dan kinerja keuangan bank syariah GCC. Selanjutnya peneliti Dewi, dkk (2016), meneliti pada 13 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011 - 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *sustainability report* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan (CR, ROA, EPS, Tobin’s Q). Peneliti Wijayanti (2016), meneliti pada 10 perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan mempublikasikan *sustainability report* selama 3 tahun 2013 – 2015. Hasil penelitian dengan menggunakan uji *panel least square* menunjukkan bahwa semua dimensi *sustainability report* yaitu dimensi ekonomi, lingkungan, dan sosial berpengaruh terhadap profitabilitas (*return on asset*). Peneliti Xie, *et al* (2017), meneliti pada data keuangan 6.631 perusahaan di tahun 2015 dari 74 negara dan 11 sektor digunakan untuk memperkirakan efisiensi untuk masing - masing perusahaan dan menggunakan pendapatan sebagai output. Menghasilkan tingkat pengungkapan informasi LST yang moderat memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap efisiensi perusahaan. Lebih spesifiknya, efisiensi perusahaan dan pengungkapan LST memiliki hubungan positif pada tingkat pengungkapan menengah, di mana sebagian besar observasi terjadi. Di antara pengungkapan yang berbeda, pengungkapan tata kelola memiliki hubungan positif terkuat, diikuti oleh pengungkapan sosial dan pengungkapan lingkungan. Sedangkan peneliti Rahmawati, dkk (2017), meneliti pada 12 perusahaan sub sektor pertambangan batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun tahun 2013 – 2015. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *corporate social responsobility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1. **Kerangka Konseptual Penelitian**

2

4

*Cash Conversion Cycle*

Dewan Komisaris

Komite Audit

Kepemilikan Institusional

Pengungkapan *Sustainability Report*

Kinerja Keuangan Perusahaan (ROA)

3

5

1

Sumber : Dikembangkan untuk Penelitian

**Gambar 2.1. Kerangka Konseptual Penelitian**

Keterangan :

* + - 1. (Telly dan Ansori, 2017 ; Hoang *et al*, 2018 ; Rahmantika dan Juliarto, 2020 ; Permana dan Ugut, 2021)
      2. (Hidalgo *et al*, 2011 ; Rahmawati dkk, 2017 ; Dewi, dkk 2018 ; Irma, 2019; Danoshana dan Ravivathani, 2019)
      3. (Hidalgo *et al*, 2011 ; Rahmawati dkk, 2017 ; Irma, 2019 ; Danoshana dan Ravivathani, 2019)
      4. (Hidalgo *et al*, 2011 ; Setiawan, 2016 ; Fadilah , 2017 ; Irma, 2019 ; Saifi, 2019)
      5. (Platonova *et al*, 2016 ; Dewi dkk, 2016 ; Wijayanti, 2016 ; Rahmawati dkk, 2017 ; Xie *et al*, 2017)

1. **Pengembangan Hipotesis**

Berdasarkan kerangka konseptual penelitian diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. **Pengaruh *Cash Conversion Cycle* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

*Cash conversion cycle* (CCC) merupakan sebuah perhitungan untuk mengukur seberapa lama kas diikat dalam inventaris sebelum dijual dan uang tunai dapat dikumpulkan dari pelanggan untuk membayar hutang. Sehingga akan didapatkan analisa baik atau tidaknya kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian Telly dan Ansori (2017), Hoang, *et al* (2018), Permana dan Ugut (2021) menunjukkan hasil bahwa manajemen modal kerja *cash conversion cycle* (CCC) berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Rahmantika dan Juliarto (2020) bahwa siklus konversi kas berpengaruh secara signifikan negatif terhadap profitabilitas perusahaan (ROA). Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis pertama sebagai berikut :

**H-1 : *Cash Conversion Cycle* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

1. **Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

KNKG (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG.

Penelitian Rahmawati, dkk (2017), Irma (2019), Danoshana dan Ravivathani (2019) menunjukkan hasil bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh peneliti Dewi, dkk (2018) bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Selanjutnya Penelitian Hidalgo, *et al* (2011) juga menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan modal intelektual, namun ketika jumlahnya bertambah akan membalikkan hasil menjadi menurunkan kapasitas pengawasan dan pengendalian dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis kedua sebagai berikut :

**H-2 : Dewan Komisaris berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

1. **Pengaruh Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Komite audit membantu dewan komisaris melakukan pengecekkan, pemeriksaan, dan penelitian yang dianggap penting terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi jajaran direksi dalam pengelolaan perusahaan tercatat. Keberadan komite audit diharapkan mampu meningkatkan kualitas pengawasan internal perusahaan, serta mampu mengoptimalkan mekanisme *checks and balances*, yang pada akhirnya ditujukan untuk memberikan perlindungan yang optimum kepada para pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya.

Penelitian Irma (2019), Danoshana dan Ravivathani (2019) menunjukkan hasil bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh Rahmawati, dkk (2017) bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Hidalgo, *et all* (2011) menjelaskan ukuran komite audit tidak memiliki kaitan dengan pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis ketiga sebagai berikut :

**H-3 : Komite Audit berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

1. **Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

Menurut Wiranata dan Nugrahanti (2013), kepemilikan saham institusional adalah kepemilikan yang dimiliki oleh pihak institusi yakni : perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi, maupun perusahaan swasta. Kepemilikan saham institusional dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan yang dinilai dari saham yang dimiliki para pemegang saham dibandingkan dengan saham yang beredar. Jika modal saham besar, berarti investasi yang diberikan kepada perusahaan besar, sehingga perusahaan mendapat aliran dana yang sehat.

Penelitian Setiawan (2016), Irma (2019), Saifi (2019), menunjukkan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian Fadillah (2017) bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Hidalgo, *et all* (2011) menjelaskan kepemilikan institusional menghambat pengungkapan modal intelektual. Berdasarkan uraian di atas, peneliti merumuskan hipotesis keempat sebagai berikut :

**H-4 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

1. **Pengaruh Pengungkapan *Sustainability Report* terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**

*Sustainability report* adalah pelaporan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengukur, mengungkapkan (*disclose*), serta upaya perusahaan untuk menjadi perusahaan yang akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk tujuan kinerja perusahaan menuju pembangunan yang berkelanjutan. Manfaat *sustainability report* yaitu untuk memungkinkan perusahaan memperkirakan dampak operasi terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi, serta dapat membantu perusahaan terlibat lebih baik dengan pihak yang berkepentingan. Dengan memberitahu pemangku kepentingan tentang keputusan proyek jangka pendek, menengah, dan panjang organisasi, perusahaan dapat lebih memahami mana yang mungkin memiliki keluaran keuangan yang positif.

Penelitian Platonova, *et al* (2016), Xie, *et al* (2017), Dewi, dkk (2016) dan Wijayanti (2016), menunjukkan hasil bahwa *sustainability report* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Namun hasil berbeda ditunjukkan Rahmawati, dkk (2017) bahwa *corporate social responsobility* (CSR) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. oleh Berdasarkan uraian di atas, penulis merumuskan hipotesis kelima sebagai berikut :

**H-5 : Pengungkapan *Sustainability Report* berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan.**